

**MODEL KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG
DALM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH
PEMILIHAN 3 KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh

**ALIYA RAHMADEWI
NPM 2016011029**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**MODEL KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG
DALM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH
PEMILIHAN 3 KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

**ALIYA RAHMADEWI
NPM 2016011029**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

MODEL KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

ALIYA RAHMADEWI

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi anggota DPRD Provinsi Lampung yang dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran dan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendominasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Temuan dari penelitian ini terkait dengan model komunikasi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat pada umumnya yang dilakukan adalah *reses*. Meskipun model komunikasi *reses* digunakan oleh semua anggota DPRD Provinsi Lampung, namun implementasinya berbeda di lapangan. Model komunikasi yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan model komunikasi linier (satu arah), interaksional (dua arah), dan jaringan publik melalui *temu warga* yang melibatkan sejumlah pihak desa, kegiatan sosial yang menyelenggarakan program bermanfaat untuk masyarakat, *door to door* dengan melakukan kunjungan personal secara langsung ke masyarakat, bakti sosial/acara massal dengan melibatkan diri pada kegiatan massal, dan iklan publik yaitu aktif merespon di media sosial. Hasil kegiatan tersebut dapat menerima aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk direalisasikan.

Kata kunci : Model Komunikasi, Aspirasi, DPRD Provinsi Lampung

ABSTRACT**COMMUNICATION MODEL FOR MEMBER OF REGIONAL
LEGISLATIVE COUNCIL LAMPUNG PROVINCE IN ABSORBING
ASPIRATIONS IN ELECTORAL DISTRICT 3 PESAWARAN REGENCY****BY****ALIYA RAHMADEWI**

This research aims to determine the communication model for members of the Lampung Province DPRD during the recess period in electoral district 3 of Pesawaran Regency and the supporting and inhibiting factors faced by members of the Lampung Province DPRD in absorbing the aspirations of the community. The research method used is qualitative. Data collection through interviews dominates and documentation. Researchers used George Herbert Mead's theory of symbolic interactionism as the theoretical basis for this research.

The findings from this research are related to the communication model for members of the Lampung Province DPRD in absorbing the aspirations of the community. In general, what is done is recess. Although the recess communication model is used by all members of the Lampung Province DPRD, its implementation is different in the field. The communication model used to absorb community aspirations is the linear (one-way), interactional (two-way) communication model, and public networks through community meetings involving a number of village parties, social activities that organize beneficial programs for the community, door to door by conducting direct personal visits to the community, social service/mass events by involving oneself in mass activities, and public advertising, namely actively responding on social media. The results of this activity can receive aspirations from the community which will later be fought for by members of the Lampung Province DPRD to be realized.

Keywords : Communication Model, Aspirations, DPRD Lampung Province

Judul Skripsi : **MODEL KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENYERAP
ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH
PEMILIHAN 3 KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Aliya Rahmadewi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016011029**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Anita Damayantie, M.H.

NIP. 19690304 199403 2 002

2. Ketua Jurusan

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

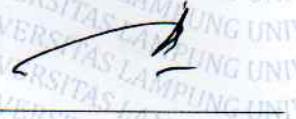
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dra. Anita Damayantie, M.H.**



Penguji Utama

: **Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Januari 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Aliya Rahmadewi

Aliya Rahmadewi

NPM 2016011029

RIWAYAT HIDUP



Aliya Rahmadewi adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Maret 2002. Penulis adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Toto Suprayitno dan Ibu Safaria Yunida, M, Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Putri Azizah Bandar Lampung pada tahun 2008, pendidikan dasar di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2014, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2017, pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi (HMJ Sosiologi) menjadi Anggota bidang Media dan Creator tahun 2020-2021, Sekretaris Bidang Media dan Creator tahun 2022, serta menjadi Ketua Bidang Media dan Creator tahun 2023. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan prestasi juara 2 International 3- Minute Nusantara Video Challenge. Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat pada gelombang 1 tahun 2023. Penulis melaksanakan program Magang/PKL di Pemerintah Provinsi Lampung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama enam bulan pada tahun 2023.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al Baqarah : 286)

“Lakukanlah kewajiban dengan Ikhlas, dan terimalah apa yang menjadi hak juga dengan penuh keikhlasan, dan lihatlah apa yang terjadi esok hari.”

(Safaria Yunida)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, skripsi ini ku persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua

Ayah Toto Suprayitno dan Bunda Safaria Yunida, M, Pd. atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan serta didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran, dan doa-doa yang tiada henti senantiasa mengiringi langkahku.

Kakak-Kakakku

M. Farid Al-Rianto, S.H dan Sarah Rizki Maulidia, S, Pd.

Seluruh Keluarga Masytari

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga.

Sahabat-sahabatku

Terima kasih telah memberi warna dihidupku

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Model Komunikasi Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran" Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan Ikhlas kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan ridho serta keberkahan ilmunya, telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua yang aku sayangi Ayah Toto Suprayitno dan Bunda Safaria Yunida, M.Pd, terimakasih selalu mendoakan tiada henti, didikan, pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Drs. Ida Nurhida, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. Selaku ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
6. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung

7. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan, dan memberikan saran serta masukan yang bermanfaat dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ibu kesehatan semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Bapak Drs. Susetyo, M.Si. dan Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si. selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terimakasih untuk masukan, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak dan Ibu kesehatan dan semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT aamiin.
9. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam awal perkuliahan hingga selesai, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dari Allah SWT aamiin.
10. Segenap dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu melayani keperluan administrasi.
11. Abangku tersayang M. Farid Al-Rianto yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakakku tercinta Sarah Rizki Maulidia yang selalu memberikan semangat, dukungan, candaan, dan mendoakan serta menantikan keberhasilan dari adikmu ini.
13. Bicik, Ibu Intan, dan Bapak Mustaqim yang selalu membantu, memberikan semangat dan perhatian demi keberhasilanku
14. Seluruh keluarga besar Masytari terima kasih atas dukungan, doa, dan bantuannya selama ini.
15. Untuk Bagus Fahri Maulana, partner terbaikku. Terima kasih atas dukungan yang diberikan, terima kasih sudah menjadi teman dalam berbagi cerita dan ide, serta rasa Syukur karena selalu ada saat dibutuhkan. Semoga kamu selalu berada dalam perlindungan Allah SWT dan segala urusanmu dimudahkan. Aamiin.

16. Sahabat sejak sekolah ku Vicky Permata Safitri yang selalu memberi semangat. Terima kasih selalu menemani, dan membantu ku di segala kondisi apapun. Semoga kebaikan mu dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.
17. Untuk teman-temanku di Sosiologi Mesia Rohbani, Griselda Maya Azzahra, Qintara Faiza Rangkuti. Terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama proses kuliah, masa magang, dan penyelesaian skripsi. Semoga kita dapat terus menjaga hubungan baik di antara kita.
18. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2020 yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda. Semoga hubungan baik di antara kita tetap terjaga.
19. Untuk HMJ sosiologi. Terimakasih untuk segala kesempatan yang diberikan kepada penulis hingga dapat mengembangkan diri dan memiliki banyak pengalaman. Terima kasih pula atas kesempatan menjadi Ketua Bidang Media dan Creator di Kabinet Nawasena tahun 2023. Semoga HMJ Sosiologi Unila senantiasa menjadi tempat bagi anggotanya untuk mengembangkan keterampilan di bidang-bidang yang mereka pilih.

Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 6 Februari 2024
Penulis

Aliya Rahmadewi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Model Komunikasi.....	8
1. Temu Warga	11
2. Kegiatan Sosial	11
3. Door to Door.....	11
4. Bakti Sosial/Acara Massal.....	12
5. Iklan Publik.....	12
2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	13
2.2.1 Faktor Pendukung	13
2.2.2 Faktor Penghambat	13
2.3 Tinjauan Tentang DPRD	14
2.3.1 Pengertian DPRD	14
2.3.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD.....	15
2.3.3 Tugas, Wewenang dan Hak DPRD	16
2.4 Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat	18
2.4.1 Pengertian Aspirasi	18
2.4.2 Penyerapan Aspirasi Masyarakat	18

2.5	Landasan Teori	19
2.5.1	Teori Interaksi Simbolik	19
2.6	Penelitian Terdahulu	20
2.7	Kerangka Berfikir	23
III.	METODE PENELITIAN	25
3.1	Tipe Penelitian	25
3.2	Fokus Penelitian	26
3.3	Lokasi Penelitian	27
3.4	Informan Penelitian	27
3.5	Jenis dan Sumber Data	28
1.	Data Primer	28
2.	Data Sekunder	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data	28
1.	Wawancara Mendominasi	28
2.	Dokumentasi	29
3.7	Teknik Analisis Data	29
1.	Reduksi Data	29
2.	Penyajian Data	29
3.	Verifikasi	30
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1	Gambaran Umum	31
1.	Gambaran Umum Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran	31
2.	Visi dan Misi DPRD Provinsi Lampung	33
3.	Profil DPRD Provinsi Lampung.....	34
4.2	Profil Informan.....	36
4.2.1	Informan 1	37
4.2.2	Informan 2	37
4.2.3	Informan 3	37
4.2.4	Informan 4	38
4.2.5	Informan 5	38
4.2.6	Informan 6	38
4.2.7	Informan 7	38

4.3 Hasil Penelitian	40
4.3.1 Model Komunikasi Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan	40
1. Model Komunikasi Linier (Satu Arah)	41
2. Model Komunikasi Interaksional (Dua Arah)	43
3. Model Komunikasi Jaringan Publik	44
4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan	52
1. Internal	52
2. Eksternal	53
4.3.3 Tanggapan Masyarakat Terhadap Model Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Para Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan.....	56
4.4 Pembahasan.....	65
V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1. Penelitian Terdahulu	21
2. Daftar Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024	34
3. Profil Informan	39
4. Faktor Pendukung Yang Dihadapi Oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat	54
5. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat	55
6. Hasil Penelitian Model Komunikasi Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	24

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi di Indonesia melibatkan pemerintahan daerah sebagai elemen krusial. Pemerintahan daerah secara erat terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berfungsi sebagai badan legislatif tingkat daerah. Dengan kata lain, DPRD menjadi mitra penting pemerintahan daerah dalam kerangka demokrasi, memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat. Ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disingkat DPRD merupakan representasi dari seluruh kalangan masyarakat dalam struktur pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi dan peran krusial berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

A. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan melalui tiga metode. Pertama, melibatkan Kepala Daerah dalam diskusi dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah. Kedua, mengajukan usulan mengenai rancangan peraturan daerah. Ketiga, bekerja sama dengan Kepala Daerah dalam menyusun program pembentukan peraturan daerah. Program tersebut mencakup daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran. Dalam menetapkan program ini, DPRD berkoordinasi dengan Kepala Daerah.

B. Fungsi anggaran

Fungsi anggaran diimplementasikan melalui proses diskusi untuk mencapai persetujuan bersama terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah. Proses tersebut terdiri dari beberapa langkah, yaitu: Pertama, membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mencakup Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Kepala Daerah. Kedua, membahas rancangan Perda terkait APBD daerah. Ketiga, membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD daerah. Keempat, membahas rancangan Perda yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD daerah.

C. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan dijalankan melalui pengawasan terhadap beberapa aspek, yaitu: Pertama, pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketiga, pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Implementasi ketiga fungsi DPRD harus memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Adianto & As'ari (2016) mengartikan aspirasi masyarakat sebagai harapan dan tujuan mereka untuk mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Pentingnya melaksanakan aspirasi masyarakat adalah untuk menghindari ambiguitas pembangunan, yang dapat terjadi sebagai upaya manipulasi oleh elit terhadap masyarakat dan sebagai bentuk demokrasi yang tidak nyata karena pembangunan hanya berfungsi sebagai ide untuk kepentingan elit semata (Zuhriansyah, 2013). Untuk menghindari situasi

tersebut, anggota dewan perlu mengimplementasikan model komunikasi yang efektif dalam menangkap aspirasi di daerah pemilihannya.

Eksistensi lembaga perwakilan rakyat memiliki tujuan agar masyarakat dapat turut serta dalam mengelola pemerintahan daerah melalui perwakilan mereka di DPRD. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Azam Awang, yang menyatakan bahwa peran anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat seharusnya mencakup hubungan dengan anggota masyarakat yang diwakilinya, baik secara perorangan, kelompok, maupun secara keseluruhan. Oleh karena itu, secara prinsip, setiap wakil harus memandang diri mereka sebagai perwakilan warga negara yang tercakup dalam ruang lingkup perwakilan secara menyeluruh (Azam Awang, 2006).

Posisi dan eksistensi lembaga perwakilan rakyat memiliki signifikansi penting dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang tercermin dalam kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan antara kebijakan yang diformulasikan dengan partisipasi masyarakat yang aktif, konkret, dan bertanggung jawab. UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya memiliki peran tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial.

Para anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat, memiliki kewajiban untuk mengadvokasi kepentingan rakyat. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab ini, anggota dewan diharapkan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dengan berbagai cara, seperti menghimpun pendapat umum dan menerima masukan secara langsung. Respons masyarakat terhadap lembaga perwakilan sepatutnya mampu menjadi saluran untuk mengekspresikan aspirasi mereka, dan hal ini perlu dibuktikan oleh setiap anggota legislatif melalui interaksi dengan masyarakat. Anggota legislatif memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dan bertemu dengan warga di daerahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang wakil rakyat perlu memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh

wakil rakyat untuk mengetahui harapan masyarakat, termasuk melalui komunikasi langsung. Ini merupakan aspek yang tak terhindarkan dalam peran seorang wakil rakyat. Hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka, yang kemudian akan diperjuangkan dalam kebijakan, adalah hak yang harus dihormati dan diakui.

DPRD Provinsi memiliki peran sentral dalam mewakili dan melayani aspirasi masyarakat di tingkat provinsi. Masyarakat memandang DPRD Provinsi sebagai lembaga yang harus mampu mendengar, memahami, dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan mereka (Robinson Tarigan, 2006). Kondisi idealnya DPRD seharusnya mengumpulkan aspirasi dari masyarakat di wilayahnya dan selanjutnya mengalirkan aspirasi tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan dalam pembuatan undang-undang atau penyusunan kebijakan nasional. Namun, pada kenyataannya, hasil penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD terhadap konstituennya di berbagai daerah masih menunjukkan kurangnya koordinasi yang efektif, sesuai dengan harapan.

Salah satu aspek kunci dalam menjalankan peran tersebut adalah komunikasi. Anggota DPRD Provinsi Lampung harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan beragam kelompok masyarakat, mengumpulkan aspirasi, dan meresponsnya dengan kebijakan dan tindakan yang sesuai. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam berkomunikasi dengan masyarakat semakin kompleks, terutama dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai isu sosial dan politik yang berkembang. Komunikasi memiliki peranan penting dalam memperkuat hubungan antara anggota DPRD dan masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana komunikasi memengaruhi anggota DPRD, perlu memperhatikan media komunikasi yang digunakan.

Untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara anggota DPRD dan konstituennya, diperlukan komunikasi yang aktif dan berkelanjutan. Grindle

(2001) mengungkapkan bahwa terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh anggota dewan untuk berkomunikasi, yaitu :

1. Temu Warga
2. Melakukan kegiatan sosial
3. *Door to Door*
4. Bakti Sosial/Acara Massal
5. Iklan Publik

Tugas seorang anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai perwakilan rakyat adalah berjuang untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, anggota dewan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi aspirasi yang berkembang dengan berbagai metode, termasuk melalui pelaksanaan kegiatan formal reses yang melibatkan pengumpulan pandangan masyarakat secara langsung. Kegiatan kunjungan reses oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

DPRD Provinsi Lampung mencatat hasil pertemuan kegiatan reses tahun 2022 pada daerah pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran bahwa terserapnya beberapa aspirasi masyarakat di berbagai macam bidang yaitu bidang infrastruktur jalan, bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pemerintahan, dan aset Provinsi Lampung. Di beberapa daerah juga terdapat keluhan dari konstituen terkait kurangnya responsivitas anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen. Beberapa konstituen merasa kehilangan saluran komunikasi dengan anggota DPRD yang seharusnya menjadi perantara untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak pernah melakukan kunjungan atau berkomunikasi dengan para konstituennya. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi konstituen dari partai politik tertentu untuk menyampaikan aspirasi mereka karena kurangnya saluran komunikasi yang efektif. Bahkan, dalam beberapa situasi di mana anggota DPRD sudah melakukan kunjungan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, ternyata aspirasi

tersebut tidak pernah diwujudkan dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka. Sebagai akibatnya, terdapat ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD. Oleh karena itu, penting bagi anggota dewan untuk meningkatkan akomodasi dan respon terhadap aspirasi masyarakat, sehingga komunikasi yang efektif dapat terjalin, dan kebutuhan serta harapan konstituen dapat tercermin dengan lebih baik dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

Permasalahan-permasalahan di atas mencerminkan preseden buruk bagi masyarakat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran. Jika permasalahan aspirasi masyarakat dibiarkan begitu saja maka para wakil rakyat dianggap tidak memperjuangkan rakyatnya untuk mendapatkan kebutuhan masyarakatnya melalui sebuah kebijakan dan program tertentu. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPRD Provinsi Lampung untuk berinteraksi secara langsung dengan penduduknya dalam menjalankan kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi dari anggota DPRD Provinsi Lampung dalam melakukan interaksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka. Memahami kondisi tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Model Komunikasi Anggota DPRD Provinsi Lampung Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model komunikasi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat komunikasi yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam melakukan komunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori interaksi simbolik serta membantu dalam pemahaman tentang partisipasi politik masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman anggota DPRD untuk meningkatkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat terutama pada masyarakat di daerah pemilihannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Komunikasi

Dalam bukunya *A Dictionary of Linguistics Phonetics*, David A Crystal menyatakan bahwa komunikasi terjadi ketika pengirim dan penerima memahami informasi dengan maksud yang sama (Liliweri, 2011). Model komunikasi yang dijelaskan oleh Arni (2014) adalah representasi yang sederhana dari proses komunikasi yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen komunikasi.

Menurut Wener K. Severin dan W. Tankerd Jr (2008), model berperan dalam merumuskan teori dan memperlihatkan hubungan yang ada di antara keduanya. Model dianggap sebagai bagian dari teori karena keterkaitan yang erat antara model dan teori. Dalam pemilihan elemen-elemen tertentu yang disertakan dalam model, model memberikan implikasi penilaian mengenai relevansi yang menyarankan teori terkait dengan fenomena yang sedang diteorikan. Model berfungsi sebagai dasar bagi teori yang lebih kompleks, sebagai sarana untuk menjelaskan teori, dan sebagai alat untuk memperbaiki konsep-konsep yang terlibat (Mulyana, 2008).

Menurut Mulyana (2008), model komunikasi Stimulus Respon adalah model komunikasi yang paling dasar. Model mengasumsikan komunikasi sebagai sebuah proses aksi reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Sedangkan model komunikasi yang paling klasik adalah model komunikasi Aristoteles. Menurut Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif dalam buku *Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak* (2021), model komunikasi

Aristoteles dikenal sebagai model komunikasi yang berpusat pada pembicara (sumber). Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka.

Menurut Agus Hendrayady, dkk dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (2021), salah satu karakteristik model komunikasi Lasswell adalah bersifat linier atau satu arah. Artinya hanya komunikator yang aktif menyampaikan pesan. Sementara komunikan digambarkan hanya menerima pesan dari komunikator, tanpa memberi umpan balik. Berbeda dengan model komunikasi Lasswell, Shannon dan Weaver menggambarkan proses komunikasi secara lebih rinci. Model komunikasi menurut Yasir dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif (2020) mengatakan bahwa Shannon dan Weaver mendeskripsikan proses komunikasi yang berlangsung linier. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan sinyal dan pesan, sumber informasi dan transmitter, serta penerima (receiver) dan tujuan (destination).

Menurut Wilbur Schramm (1954) Model Komunikasi Schramm membuat serangkaian model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana, lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Sedangkan Model Westley dan Maclean berbicara dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Perbedaan yang paling penting diantara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik (feedback). Di interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung, sedang di komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat.

Beberapa definisi model komunikasi diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga model komunikasi yang menonjol yaitu yang Pertama Model Komunikasi Linier. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver (1949) dalam buku *The Mathematical of*

Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran (channel). Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear (linear communication model). Model komunikasi ini menekankan pada proses komunikasi satu arah.

Kedua, Model Komunikasi Interaksional yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah: dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Ketiga Model Komunikasi Transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif: pengirim dan penerima sama-sama bertanggungjawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi.

Menurut Grindle (2001), komunikasi merupakan pertukaran dan aliran informasi serta ide dari satu individu ke individu lainnya. Dalam prakteknya, komunikasi melibatkan seorang pengirim pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif hanya terjadi apabila penerima memahami informasi atau ide yang diterima dengan interpretasi yang sesuai dengan pengirim baik itu satu arah, dua arah, maupun melalui jaringan publik. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses komunikasi melibatkan pesan berupa informasi, fakta, atau kata-kata oleh pengirim serta penerima, baik individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Dalam proses penyampaian pesan, penerima menerima dua proses yaitu isi dan konteks. Grindle (2001) juga mengemukakan bahwa anggota dewan memiliki banyak cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat, antara lain:

1. Temu Warga

Temu warga merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sejumlah pihak masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh keagamaan, perangkat daerah, kelompok perempuan, pelaku usaha, dan pihak lain yang memiliki kepentingan, baik yang berbeda maupun yang sejalan. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan prioritas kepentingan dengan maksud meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan temu warga memiliki manfaat sebagai metode efektif untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan dan kelompok masyarakat.

2. Melakukan Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial merujuk pada aktivitas massal yang memiliki sifat sosial dan ditujukan untuk target atau konstituen tertentu. Contohnya termasuk penyelenggaraan program pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu atau acara sunatan massal. Dalam jenis kegiatan ini, diharapkan anggota DPRD dapat berperan sebagai pelaksana atau pendukung acara tersebut. Seperti halnya kegiatan massal lainnya, kegiatan sosial ini memberikan manfaat bagi anggota DPRD dalam membangun hubungan emosional secara pribadi, yang pada gilirannya menciptakan rasa kepemilikan, pemahaman terhadap kondisi, dan penemuan potensi dari masyarakatnya.

3. *Door to Door*

Door to Door adalah bentuk interaksi personal antara calon anggota dewan dan masyarakat di daerah pemilihannya. Anggota dewan melakukan kunjungan langsung ke rumah beberapa masyarakat untuk tujuan silaturahmi, bertanya kabar, dan menerima masukan atau aspirasi secara langsung dari mereka. Pola hubungan yang sangat pribadi yang terbentuk melalui kegiatan *door to door* terbukti sangat efektif dalam mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, serta menunjukkan perhatian langsung anggota dewan terhadap situasi yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

4. Bakti Sosial/Acara Massal

Kegiatan bakti sosial atau acara massal adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara massal tanpa memperhatikan latar belakang, ideologi, strata sosial, atau profesi, dan biasanya berlangsung dalam periode tertentu yang bersifat sementara. Dalam kegiatan semacam ini, peran anggota DPRD dapat berperan sebagai pelaksana dan dalam beberapa situasi, berfungsi sebagai pengorganisir yang mengumpulkan berbagai pihak untuk berinteraksi melalui komunikasi. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan massal seperti olahraga, hiburan, atau kegiatan sosial masyarakat. Melalui bakti sosial atau acara massal, anggota DPRD dapat mengembangkan jaringan di kalangan konstituen, terlibat dalam kegiatan sosial di komunitas, memperkuat hubungan sosial dengan konstituen, dan menyediakan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

5. Iklan Publik

Iklan publik merupakan cara anggota dewan menyampaikan ide, gagasan, pengalaman, kinerja, visi misi, dan harapan mereka kepada konstituen melalui iklan yang dipasang di media sosial. Iklan tersebut memiliki durasi singkat, fokus, dan ditujukan langsung kepada penerima pesan. Iklan ini tidak terbatas oleh waktu tertentu karena keterkaitannya dengan momen dan potensi pendanaan yang dimiliki oleh para anggota dewan. Tujuan dari iklan publik adalah untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan dari anggota dewan secara visual sesuai dengan maksudnya. Penggunaan iklan media juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan aspirasi atau masukan secara daring.

Merujuk pada beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model komunikasi adalah representasi sederhana dari proses komunikasi yang membantu mengilustrasikan hubungan antara elemen-elemen komunikasi. Sementara itu, komunikasi sendiri adalah pertukaran informasi

dan ide antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai pemahaman yang sama.

2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

2.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya (<https://brainly.co.id>). Dapat dikatakan faktor pendukung merupakan suatu kondisi yang dapat memfasilitasi atau meningkatkan efektivitas proses komunikasi. Dalam sebuah model komunikasi, faktor-faktor ini dapat memainkan peran penting dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran informasi. Faktor pendukung sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam (<https://brainly.co.id>). Hal ini berarti faktor internal merupakan sesuatu yang timbul dikarenakan kesadaran diri sendiri.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar (<https://brainly.co.id>). Dapat dikatakan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari luar. Faktor eksternal menjadi penting karena akan berperan dalam memberikan motivasi ketika faktor internal mulai menghilang.

2.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya (<https://brainly.co.id>). Menurut (Sutaryono, 2015) faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

a) Faktor Internal

Mengutip pendapat (Sutaryono, 2015) mengemukakan bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti tidak memiliki kesadaran keterampilan komunikasi yang baik.

- b) Mengutip pendapat (Sutaryono, 2015) Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh kelompok kepentingan tertentu dalam mengambil keputusan.

2.3 Tinjauan Tentang DPRD

2.3.1 Pengertian DPRD

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Miriam Budiarjo, yang dikutip oleh Baskoro (2005), DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat mencerminkan kebijakan-kebijakan. Fuad, seperti yang dijelaskan dalam jurnal administrasi negara (2000), mengartikan DPRD sebagai institusi yang menjadi tempat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Dengan merangkum beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki tugas membuat peraturan daerah, dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

2.3.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi ini dapat diartikan bahwa kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah terwujud dalam penyusunan Peraturan Daerah.

2. Fungsi Anggaran

Berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran atau APBD harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

3. Fungsi Pengawasan

DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan implementasi produk hukum daerah.

Berdasarkan uraian fungsi DPRD di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga fungsi DPRD saling terkait dengan operasional Pemerintah Daerah. Fungsi legislasi terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, fungsi anggaran terlibat dalam perencanaan, penyusunan, dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Pemerintah Daerah, sementara fungsi pengawasan mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Dalam konteks penelitian ini, interaksi komunikasi antara anggota DPRD Provinsi Lampung dan masyarakat diwujudkan melalui fungsi pengawasan DPRD, yang lebih dikenal sebagai kunjungan kerja. Kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan ini akan berperan penting dalam menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas pembangunan sesuai dengan aturan hukum dan kebijakan yang telah disepakati bersama.

2.3.3 Tugas, Wewenang dan Hak DPRD

Untuk menjalankan peranan dan fungsinya agar berjalan dengan baik maka DPRD diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaannya. Pada Pasal 154 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota
- d. Memilih bupati/wali kota
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan perincian tugas dan kewenangan DPRD di atas, penelitian ini sejalan dengan tugas DPRD yang tertuang dalam poin c, yakni melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Proses ini dilakukan melalui kunjungan kerja, suatu kegiatan yang mengacu

pada penyerapan dan tindak lanjut terhadap aspirasi serta pengaduan masyarakat, dengan tujuan memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam hal ini, pasal 109 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa kewajiban Anggota DPRD Provinsi Lampung mencakup penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala, penerimaan dan penindakan atas aspirasi serta pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

Untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya, DPRD diberikan sejumlah hak-hak yang diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu DPRD mempunyai hak:

- A. Hak Interpelasi yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- B. Hak Angket yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- C. Hak Menyatakan Pendapat yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.4 Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Aspirasi

Aspirasi merupakan ekspresi kuat dari keinginan masyarakat yang dinyatakan kepada DPR RI dalam berbagai bentuk seperti pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Menyerap aspirasi, dalam konteks ini, merujuk pada kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengevaluasi aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang disampaikan kepada DPR RI (Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, 2010).

Amirudin (dalam Salman, 2009) menjelaskan bahwa konsep aspirasi memiliki dua dimensi, yakni aspirasi pada tingkat ide dan aspirasi pada tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide mengacu pada sejumlah gagasan verbal yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan aspirasi pada tingkat peran struktural berkaitan dengan keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan merangkum definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspirasi mencakup sejumlah ide yang melibatkan kebutuhan masyarakat dalam suatu forum formal dari berbagai lapisan masyarakat, sementara juga melibatkan partisipasi langsung dalam kegiatan pemerintah.

2.4.2 Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dilakukan melalui dua tahap, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyerapan secara langsung terjadi melalui berbagai kegiatan seperti dialog tatap muka, sosialisasi, kegiatan sosial, lokakarya, dan kunjungan kerja baik dalam masa sidang maupun masa reses. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyerap, dan menampung aspirasi masyarakat. Di sisi lain, penyerapan secara tidak langsung melibatkan konsultasi dengan

Pemerintah Daerah untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Dalam konteks ini, Sirajuddin dkk (2006) menyoroti pentingnya menentukan segmentasi masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi. Penentuan ini bukan untuk diskriminasi terhadap suatu komunitas, melainkan untuk memahami dan memastikan penggunaan metode yang sesuai dalam menyerap aspirasi.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Interaksionisme Simbolik

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik yang diperkenalkan oleh George Herbert Mead. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi simbolik merupakan suatu proses yang terjadi melalui komunikasi dan membentuk makna dari simbol-simbol yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, aspirasi masyarakat yang dikomunikasikan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung diartikan sebagai simbol-simbol kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan Reses, komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat memunculkan berbagai makna dari simbol-simbol tersebut. Dengan demikian, diharapkan munculnya berbagai makna simbol kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi pembentukan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Teori interaksionisme simbolik mendefinisikan interaksi simbolik sebagai proses saling berhubungan yang melibatkan pembentukan makna dari benda atau lambang, baik yang bersifat mati maupun hidup, melalui proses komunikasi yang dapat bersifat verbal maupun nonverbal. Tujuan akhir dari interaksi simbolik adalah memberikan makna pada lambang atau simbol berdasarkan kesepakatan bersama di dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu.

Blumer (1962) menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, proses sosial dalam kelompok menciptakan dan bahkan dapat menghancurkan aturan-aturan, bukan sebaliknya. Dalam teori interaksionisme simbolik, kehidupan sehari-hari dipahami sebagai hasil dari tindakan bersama, di mana masyarakat dihasilkan melalui interaksi simbolik antarindividu dalam kelompok. Oleh karena itu, masyarakat dipandang sebagai produk dari interaksi simbolik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Blumer (dalam Veeger, 1993) mengembangkan ide Mead dengan menekankan bahwa aktor tidak hanya merespons tindakan orang lain, melainkan juga menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor selalu didasarkan pada makna penilaian yang mereka berikan terhadap tindakan orang lain. Dalam teori ini, interaksi manusia ditengahi oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau penciptaan makna dari tindakan orang lain. Dalam konteks tersebut, aktor akan melakukan pemilihan, pemeriksaan, pemikiran, pengelompokan dan transformasi makna sesuai dengan situasi dan tujuan dari tindakan yang dilakukan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengangkat tema mengenai model komunikasi antara anggota DPRD Provinsi Lampung dengan masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran. Peneliti telah melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat tiga penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dan rujukan untuk penelitian ini, yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	Utomo, Eko Priyo, dkk (2013) Yang mengkaji tentang “Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD dalam merespons dan mengakomodasi aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni bervariasi, tergantung pada sifat dari proses penyerapan aspirasi masyarakat adat, baik yang bersifat formal maupun non formal. Selain itu, strategi komunikasi juga dipengaruhi oleh kelompok masyarakat adat yang menjadi subjek penyerapan, serta latar belakang anggota DPRD yang terlibat. Faktor-faktor seperti karakteristik kelompok masyarakat adat, tatanan adat yang berlaku, dan asal-usul anggota DPRD memainkan peran penting dalam membentuk strategi komunikasi yang efektif.
2.	Goni, Michael, dkk (2019) Yang mengkaji tentang “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD di	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat selama periode 2014-2019.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019”.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan periode tersebut dapat dianggap cukup baik, terutama dalam peran mereka sebagai komunikator yang efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan kegiatan reses di daerah pemilihan mereka untuk secara langsung menyerap aspirasi dari konstituen.
3.	Amalia, Nadhila Qisthi (2017) Yang mengkaji tentang “Model Komunikasi Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP Dan Fraksi Golongan Karya Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Dapil II Kecamatan Rumbai Dan Rumbai Pesisir”	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model komunikasi yang diterapkan oleh Anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan Fraksi Golongan Karya saat melakukan reses di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung yang dihadapi oleh Anggota DPRD Fraksi PDI-P dan Fraksi Golongan Karya selama pelaksanaan reses. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi yang digunakan dalam

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
		mengakomodasi aspirasi masyarakat adalah melalui kegiatan reses.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Penelitian ini melibatkan pembandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengungkapkan berbagai strategi maupun bentuk komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Sama seperti penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat daerah pemilihannya, dengan penekanan pada lokasi yang berbeda. Persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu mencakup pendekatan kualitatif dalam menganalisis model komunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

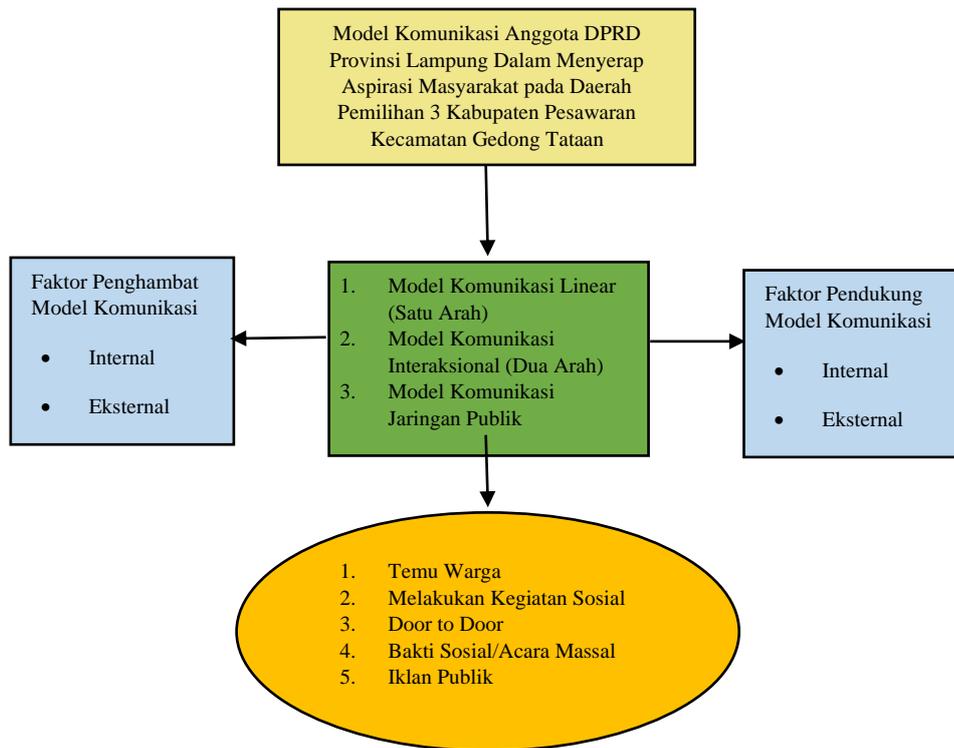
Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada kegiatan reses sebagai satu-satunya aspek yang dijelajahi dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD. Di sisi lain, penelitian ini akan lebih mendalam dalam membahas model komunikasi secara personal atau pendekatan individual yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap masyarakat daerah pemilihannya. Faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan model komunikasi ini juga akan menjadi bagian penting dalam analisis penelitian ini.

2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian-kajian teori tersebut di atas, maka peneliti merasa penting untuk mengetahui sejauh mana model komunikasi anggota DPRD pada konstituen Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan hasil konkret mengenai model komunikasi yang diterapkan oleh anggota DPRD ketika berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Proses

komunikasi tersebut menjadi esensial dalam menjalankan operasional kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Suatu model komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Dengan menerapkan model komunikasi yang baik, masyarakat dapat menilai sejauh mana dukungan, aspirasi, dan pengawasan terwujud dalam berbagai kebijakan publik.

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang bertujuan memahami fenomena tertentu, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara menyeluruh. Metode penelitian ini melibatkan deskripsi yang mengandalkan kata-kata dan bahasa, dilakukan dalam konteks alamiah, dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu di dalam suatu konteks ilmiah. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dilakukan karena dianggap sesuai dengan topik yang diteliti, sehingga metode ini digunakan dalam penelitian ini.

Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, bersumber dari partisipan serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman latar belakang dan karakteristik individu secara holistik. Tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data deskriptif yang mendalam mengenai model komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung selama kegiatan reses di Kabupaten Pesawaran, khususnya di Kecamatan Gedong Tataan. Peneliti akan menilai kinerja anggota DPRD Provinsi Lampung secara individu dalam kegiatan tersebut, melibatkan dialog, bantuan materi, serta penerimaan aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya.

Perspektif lain yang menjelaskan penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Bogdan & Biklen (1992), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku yang diamati. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana manusia mengatur diri dan bagaimana masyarakat mengorganisir latar sosialnya melalui simbol-simbol, ritual, struktur sosial, dan peran sosial. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan tanpa mengukur data secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai interpretasi individu yang menjadi subjek penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok perhatian yang berasal dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan ilmiah (Moleong, 2014). Fokus penelitian berperan dalam membatasi pengumpulan data, sehingga penelitian tetap terarah dan tidak mengalami perluasan pembahasan yang dapat menyebabkan data yang diperoleh menjadi tidak relevan dengan tujuan penelitian ini. Fokus peneliti pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Model Komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung di daerah pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan dalam menyerap aspirasi masyarakat yang di ukur melalui beberapa indikator proses komunikasi yang terdiri dari temu warga, pelaksanaan kegiatan sosial, door to door, bakti sosial/acara massal, dan iklan publik.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat ini terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DPRD Provinsi Lampung dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mewakili setiap daerah. Sebagai perwakilan, DPRD memiliki fungsi sebagai pengemban aspirasi masyarakat di daerah pemilihan mereka. Tugas dan kewenangannya mencakup pembuatan regulasi, pengesahan kebijakan, dan representasi aspirasi rakyat.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan khusus (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini penentuan informan harus berkaitan dengan yang ahli dibidangnya. Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti melibatkan 7 orang informan dalam melihat strategi komunikasi anggota DPRD serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penentuan informan harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran.
2. Masyarakat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari:
 - Tokoh Formal/Kepala Desa
 - Tokoh Masyarakat Desa
 - Pemuda

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008), data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber asli atau pertama. Jenis data ini tidak tersedia dalam bentuk yang sudah terkumpul atau berbentuk file. Sebaliknya, data primer harus dicari melalui narasumber atau, dalam istilah teknis, responden. Responden adalah orang yang menjadi objek penelitian atau yang dijadikan sumber untuk mendapatkan informasi dan data. Dalam konteks penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan seseorang yang menjadi informan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008), data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Contohnya, data ini dapat berasal dari informasi yang diperoleh dari orang lain atau dari dokumen-dokumen. Data sekunder memiliki karakteristik sebagai data pendukung untuk memenuhi kebutuhan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan adalah dokumen-dokumen jurnal.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara mendominasi dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendominasi

Menurut Estenberg sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015), wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab. Dengan menggunakan teknik wawancara mendominasi, penelitian ini akan melibatkan anggota DPRD Provinsi Lampung dan masyarakat dari Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan.

Tujuan dari wawancara mendominasi adalah untuk memperoleh informasi yang lebih terbuka, fleksibel, dan memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan pendapat dan ide secara lebih luas (Estenberg dalam Sugiyono, 2015).

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan buku, catatan, dokumen, angka, dan gambar, seperti laporan dan informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti yang muncul selama proses wawancara, sehingga dapat memberikan dukungan tambahan pada hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah, yang kemudian diakhiri dengan penyimpulan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang signifikan dan kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data ini mencakup rangkuman, pemilihan informasi yang esensial, fokus pada elemen penting, dan identifikasi tema serta pola-pola yang muncul. Dengan mereduksi data, gambaran yang diperoleh menjadi lebih jelas, memudahkan peneliti untuk tahap pengumpulan data berikutnya, dan memungkinkan penemuan yang lebih spesifik jika diperlukan (Sugiyono, 2014).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, peneliti dapat lebih mudah

memahami dinamika yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 2014). Kesimpulan yang diambil pada awalnya bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan penemuan data lebih lanjut. Kesimpulan tersebut menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan yang akurat dan valid menjadi tujuan utama dalam tahap verifikasi (Sugiyono, 2014).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Model Komunikasi Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Masa Reses di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran Kecamatan Gedong Tataan.

Sesuai pemaparan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa model komunikasi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat selain reses adalah kegiatan temu warga, kegiatan sosial masyarakat, *door to door*, bakti sosial/acara massal dan iklan publik. Sementara itu, tidak semua anggota DPRD melakukan model komunikasi tersebut di seluruh desa pada daerah pemilihannya sehingga masyarakat tidak merasakan model-model komunikasi tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat komunikasi yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pesawaran.

Terlaksananya strategi komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap masyarakatnya tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Berdasarkan pemaparan wawancara informan diatas, faktor pendukung dan faktor penghambat dari internal maupun eksternal yang dirasakan oleh semua anggota dewan adalah sebagai berikut :

A. Faktor pendukung internal :

- Adanya pembiayaan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan sosial lainnya yang bersifat menyentuh masyarakat.

- Sesama anggota dewan bahu membahu melakukan kegiatan tersebut sehingga ada daya dukung nya untuk satu sama lain.
- B. Faktor pendukung eksternal yaitu dari masyarakat ternyata mempunyai harapan yang tinggi kepada anggota DPRD Provinsi Lampung sehingga mereka merespon positif terhadap kegiatan dewan.
- C. Faktor penghambat internal yang dihadapi dari anggota DPRD adalah masalah waktu karena banyaknya desa yang ada di ketiga kabupaten daerah pemilihan membuat beberapa desa tidak dikunjungi.
- D. Faktor penghambat eksternal dari masyarakat adalah polaritas politik di masyarakat dapat menciptakan pembagian yang mungkin membuat sulit bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang terbagi secara politik mungkin tidak merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD yang memiliki pandangan politik berbeda.

5.2 Saran

1. Untuk para anggota DPRD Provinsi Lampung agar bisa adil secara merata lagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga masyarakat sampai masyarakat kecil pun benar benar terbantu. Oleh karena itu masyarakat juga harus paham begitu kuatnya hasil kebijakan dari aspirasi mereka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan-masukan atau usulan-usulan program yang solutif.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin membahas terkait penelitian model komunikasi anggota DPRD dan masyarakatnya disarankan menggali lebih dalam mengenai model komunikasi alternatif yang dapat digunakan oleh anggota DPRD dalam situasi terbatasnya waktu serta pemahaman lebih lanjut tentang model komunikasi yang efisien dapat membantu meningkatkan penyerapan aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Adianto, Adianto; As'ari, H. (2016). Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Publika*, 2(1), 30–47.
- Fuad, Barrul. (2000). DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*: Vol. 1. No. 1.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sutaryono. (2015). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran Penjaskes Aktivitas Luar Kelas SD Gugus 5 dan 6 Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Online. Diakses: <http://journal.uny.ac.id/index.php/jolahraga>
- Tarigan, Robinson. (2006). *Jurnal wawasan*. USU
- Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II (2), 311– 319.

Buku :

- Awang, Azam. (2006). *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Pekanbaru; Alaf Riau.
- Baskoro, Wahyu. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan.
- Bogdan & Biklen, s. (1992). *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Fisher, B. Aurbey. (1990). *Teori-teori Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Grindle. (2001). *Membina Hubungan Konstituen, Buku Saku DPRD, dari Rakyat Amerika*. Amerika: Local Governance Support Program, LGSP.
- Hendrayady, Agus., dkk. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Naumann, Friedrich. (2011). *Konstituen, Pilar Utama Partai Politik: Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen*. Stiftung fuer die Freiheit.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba ada Serba Makna*. Jakarta: Penada Media Group
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narimawati, Umi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Salman, Muhammad (2009). *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Schramm, Wilbur. 1954. "How Communication Works", dalam *The Process and Effects of Communication*, ed. Wilbur Schramm. Urbana: University of Illinois Press.
- Shannon, Claude E, and Warren Weaver. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- Sirajuddin, dkk. (2006). *Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD*. Jakarta: YAPPIKA dan MCW.
- Sudirjo, Encep dan Muhammad Nur Alif. (2021). *Komunikasi Dan Interaksi Sosial Anak*. Bandung: CV.Salam Insan Mulia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Veeger. KJ. (1993). *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

Wener K. Severin., W. Tankerd Jr. (2008). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Bandung: Jakarta Kencana

Yasir. (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Deepublish.

Website :

Brainly. (2023). Tersedia Pada <https://brainly.co.id/tugas/17446883>. Diakses Pada 2 Februari 2024

Data Pokok Pendidikan Kemendikbud (2023). Tersedia Pada <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/120900>. Diakses Pada 5 Desember 2023 pukul 17.00 WIB.

Gedong Tataan, Pesawaran. (2023). Tersedia Pada *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Gedong_Tataan_Pesawaran. Diakses Pada 2 Januari 2024 pukul 13.00 WIB

KBBI. (Online). Tersedia Pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reses>. Diakses 12 Januari 2024 Pukul 17.00 WIB.

Perkim.id (2023). PKP Pesawaran. Tersedia Pada <https://perkim.id/profil-pkp/profil-pkp-kabupaten-pesawaran/>. Diakses pada 2 Desember 2023 pukul 15.30 WIB.